

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Lampu Kuning Anggaran Jakarta

Anggaran defisit karena dana bagi hasil dari pusat belum cair. Penerimaan pajak daerah pun tak mencapai target.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Menjelang penutupan tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 DKI Jakarta hampir dipastikan defisit. Salah satu penyebabnya ialah belum cairnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun.

"Itu jadi utang pemerintah pusat," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemarin.

APBD Perubahan 2019 mencantumkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 18,1 triliun. Dana bagi hasil itu menjadi salah satu komponen pendapatan daerah yang ditargetkan mencapai Rp 74,9 triliun.

Menurut Saefullah, dana bagi hasil belum turun karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun ini pun mengalami defisit sekitar Rp 191,1 triliun. "Dampaknya adalah penurunan penerimaan daerah," ujar dia.

Belum turunnya dana bagi hasil itu, menurut Saefullah, mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pada tahun ini berkurang. "Silpa kami dari Rp 8,51 triliun diprediksi menjadi Rp 3,08 triliun," katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun *Tempo*, selisih antara pendapatan dan belanja DKI sempat mencapai Rp 3,187 triliun. Pemerintah DKI masih mencari-cari dana untuk membayar tunjangan kinerja daerah pada Desember dan Januari mendatang. Dinas-dinas pun diminta menghemat pengeluaran.

Saefullah belum bisa menjelaskan besaran defisit serta silpa yang harus tersedia untuk membayar tunjangan kinerja daerah pegawai Jakarta. "Silpa harus ada, tapi kami menjelaskan ini (perlu) lebih dari dua hari," katanya.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Faisal Syafrudin, tidak menyangkal bahwa defisit anggaran Jakarta tahun ini juga terjadi karena belum tercapainya pendapatan dari sektor pajak. BPRD mencatat, sampai 17 Oktober 2019, penerimaan pajak daerah baru Rp 31,56 triliun atau 70,86 persen dari target pajak tahun ini sebesar Rp 44,54 triliun.

Faisal mencontohkan target pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum tercapai karena investasi di Jakarta juga menurun. "Transaksi perumahan dan pembelian tanah di DKI turun semua. Akibatnya, BPHTB enggak masuk," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta

Anies Baswedan mengatakan penerimaan pajak terpengaruh kondisi ekonomi yang menurun saat ini. "Kalau transaksinya enggak ada, apa yang mau *dipajakin*?" kata Anies di gedung DPRD, Senin lalu. Dia pun berjanji bakal mengevaluasi pendapatan dari sektor pajak setiap pekan.

Menurut Anies, salah satu langkah pemerintah Jakarta untuk mendongkrak penerimaan pajak adalah mempercepat pelbagai transaksi yang semestinya terjadi tahun depan menjadi tahun ini. "Transaksi besar yang direncanakan pada 2020 kami undang untuk diselesaikan pada 2019," ujar Anies.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Johnny Simanjuntak, mengatakan anggaran tahun ini defisit karena pemerintah DKI terlalu ambisius menargetkan pendapatan dari sektor pajak. "Kan seharusnya bisa diprediksi kondisi ekonomi yang terjadi saat ini," ujar dia.

Johnny menambahkan, pemerintah DKI seharusnya tidak bergantung pada dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Pemerintah DKI sebaiknya memangkas penyertaan modal bagi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). APBD Perubahan 2019 menyebutkan penyertaan modal daerah bagi sejumlah BUMD mencapai Rp 8,6 triliun.

● IMAM HAMDJI | LANI DIANA